



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK DAGANG
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI



**ARIO MISYA PUTRA
06940043**

**JURUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 10/PK IV/I/2012

**PENYITTAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
DAGANG
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

Disusun Oleh :

ARIO MISYA PUTRA

06 940 043

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

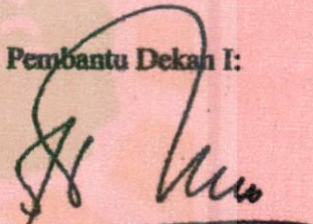
**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Hari Rabu 11 Januari 2012,
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :**

Dekan Fakultas Hukum:



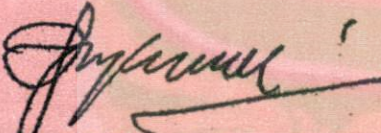
Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I:



Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 196212311989011002

Penguji I:



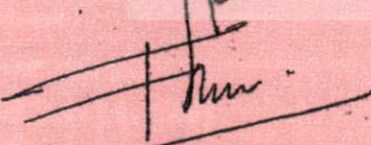
Prof. Dr. Teguh Sulistia, SH, MHUM
NIP. 196012121986031010

Penguji II:



Yusrida, SH, MH
NIP. 195910071986032001

Pembimbing I:



Fadillah Sabri, SH, MH
NIP. 195901111986031002

Pembimbing II:

Nani Mulyati, SH, MCL
NIP. 132 309 889



Ya Allah..

Pada-Mu kutitip secuil asa, Kau berikan selaksa bahagia

Pada-Mu kuharap setetes cinta, Kau limpahkan samudera cinta.

Sebuah harapan berakar keyakinan dari perpaduan hati yang memiliki keteguhan.

Walaupun didera oleh cobaan dan membutuhkan perjuangan panjang demi cita-cita yang tak mengenal kata usai.

Setitik harapan itu telah kuraih, namun sejuta harapan masih kutumpikan dan ingin kugapai.

Karya mungil ini ku persembahkan untuk Mama Rosminda dan Papa Syamsul Bahri, tercinta yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan anak-anaknya. Yang selalu memberiku harapan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang yang diberikan dengan ikhlas tanpa pamrih. Makasih untuk adikku tersayang Anike Misya Putri dan Vebyola Restika atas semua motivasinya yang membuat ku menjadi yakin atas pengerjaan skripsi ini....Mudah-mudahan karya mungil ini, menjadi kado awal terindah yang bisa ku berikan untuk semuanya...

Amiiinnnn

Ario Misya Putra, SH

**PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
DAGANG
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

(ARIO MISYA PUTRA, 06 940 043, Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler
Mandiri 71 Halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Keberadaan alat bukti dalam tindak pidana akan membantu dalam mendapatkan keadilan yang terang dan mutlak terhadap suatu tindak pidana. Keputusan diambil oleh hakim dalam suatu perkara haruslah berdasarkan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Barang bukti mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana dalam proses peradilan. Penyitaan tersebut merupakan tugas penyidik, penyidik berhak mengambil atau merampas barang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : Bagaimana cara penyidik melakukan penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum Polresta Padang, Apakah Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum Polresta Padang, Apakah solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Penyitaan pemalsuan merek dagang oleh petugas Kepolisian setelah mendapatkan laporan dari korban / saksi yang mengetahui bahwa diduga merek dagangnya telah dipalsukan oleh pihak lain. Untuk itu penyidik dapat melakukan penyidikan ditempat dimana tindak pidana tersebut terjadi. Dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hambatan yang ditemui penyidik dalam melaksanakan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang, yaitu: Barang yang akan disita telah terjual sebagian, sehingga penyidik tidak dapat menyita barang palsu tersebut secara keseluruhan. Keterbatasan personil penyidik yang turun ke lapangan. Pedagang yang mempunyai barang atau merek palsu tersebut berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dimilikinya itu palsu. Selain itu penyidik juga susah melakukan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang ini karena dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang ini yang berlaku adalah delik aduan, serta kurangnya kepatuhan produsen terhadap penegakkan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek dagang. Solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pemalsuan merek dagang adalah Upaya preventif dan represif, seperti : Pihak Penyidik Kepolisian Menjelaskan kepada penjual yang mempunyai barang alasan-alasan hukum sebab dilakukan penyitaan terhadap barang palsu, serta memperlihatkan sampel barang asli kepada penjual tersebut dan Penambahan Personil Penyidik yang turun ke lapangan yang mempunyai keahlian dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta, penulis ucapkan atas segala rahmat dan nikmat serta karunia yang telah diberikan-Nya dalam membukakan hati dan pikiran penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)”.

Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai panutan dan pimpinan umat islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini saran yang sifatnya membangun akan sangat penulis harapkan.

Ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan beriring doa buat kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, serta adik-adik penulis yang mau menolong dan mensupport penulis dengan segala apa yang

bisa dilakukan dan juga kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan penuh kepadaku. Dengan selesainya skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ucapan terimakasih yang teramat dalam dan beriring doa buat kedua orang tua penulis Papa Syamsul Bahri dan Mama Rosminda yang selalu memberikan dukungan dan doa sepenuhnya, kalianlah, penerang hidupku semua ini ku tulis untuk kebahagiaan Papa dan Mama tercinta karena, melihat senyuman Papa dan Mama tercinta adalah kebahagiaan bagi penulis.
2. Kepada Adik-adik ku Anike Misya Putri dan Vebyola Restika terimakasih atas dukungannya.
3. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Frenadin Adegustara, SH, MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Bapak Kurniawarman SH, MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
7. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program Reguler Mandiri serta Ibu Arfiani, SH, MH., selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang.

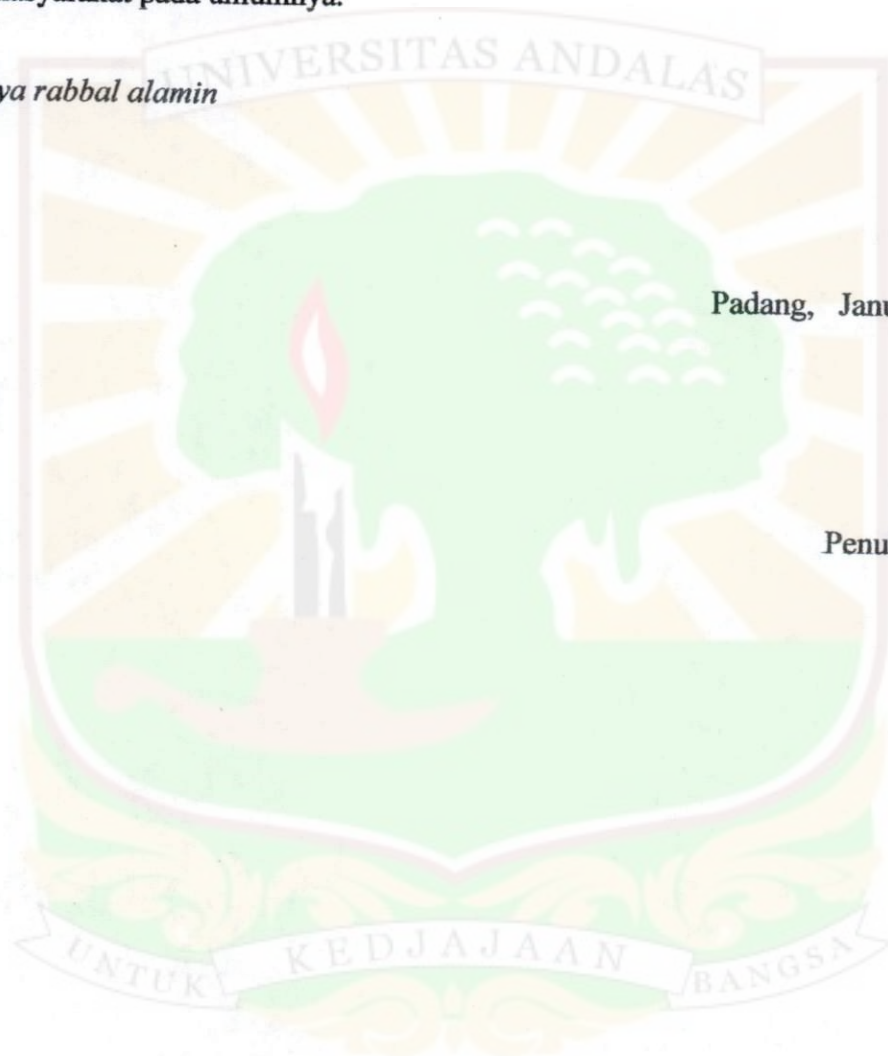
8. Bapak Prof. DR. Ismansyah, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta Ibu Nelwitis, SH, MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak Fadillah Sabri, SH, MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Nani Mulyati SH, MCL., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Staf Bapak dan Ibu dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
11. Kepada pegawai biro dan tata usaha serta seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah melayani penulis sehingga prosedur skripsi ini berjalan lancar.
12. Kepada Bapak Aiptu Sadri Hefiman, dan Briptu Peldi Nofrizal beserta pegawai negeri POLRI Polresta Padang.
13. Kepada Sukamariko, SH., Ahmad Reza Andhika, Anggun Gunawan, Vendri Aditya, SH., Havid Wahyudi, SH., Topan Winata Putra, SH., Dwi Andhika, SH., Yoseph Hadi Putra, SH., Martha Yuda, SH., Hadrian Habas, SH, Yosie Yudhia, SH., Hendra Hapsara, Wanwin Kadai serta seluruh teman-teman yang seperjuangan angkatan 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang berperan langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurang sempurnaan skripsi ini, namun demikian atas kekurangan tersebut penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya secara akademis bagi pengembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat pada umumnya.

Amin ya rabbal alamin

Padang, Januari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
--------------	---

KATA PENGANTAR.....	ii
---------------------	----

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan	
1. Pengertian Penyitaan.....	21
2. Macam-macam Benda Yang Dapat Disita.....	24
3. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyitaan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti	
1. Pengertian Barang Bukti.....	27
2. Bentuk-Bentuk Barang Bukti.....	28

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Polri

1. Pengertian Penyidik Polri.....31
2. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri.....33

D. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek.....37
2. Fungsi Merek.....41

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang.....43
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang.....45

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

- A. Cara Penyidik Melakukan Penyitaan Barang Bukti Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang di Wilayah Hukum Polresta Padang.....49
- B. Hambatan Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Penyitaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang.....62
- C. Solusi / Upaya Mengatasi Kendala Penyidik Terhadap Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang.....67

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....69
- B. Saran.....70

DARTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk menjaga agar tatanan hidup manusia dapat terjaga dengan baik. Hukum merupakan bentuk aturan yang bersifat mengatur serta memberikan sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kepentingan umum”. Seseorang yang sengaja / lalai tidak menjunjung hukum, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana.

Salah satu bentuk proses penegakan hukum pidana seperti yang dilakukan oleh lembaga hukum adalah penyitaan barang bukti. Penyitaan barang bukti merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini dilakukan oleh penyidik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam perkara pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang diperoleh dari hasil tindak pidana, serta yang dapat digunakan oleh tersangka untuk menghalang-halangi tindakan penyidikan.

Sesuai dengan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar

suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.¹

Meskipun hak pemilikan tetap pada pemiliknya yang sah, tapi karena hak penguasaannya sudah beralih ke tangan orang lain, pemilik barang tersebut sudah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap barang yang telah disita. Melakukan tindakan maksudnya adalah pemilik barang tidak boleh merusak, menghilangkan, menjual, memindahtangankan atau tindakan lainnya terhadap barang yang telah disita tersebut.

Dalam melakukan proses penyitaan terlebih dahulu penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kecuali pertama, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan, tetapi hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.²

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hal. 265.

² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1982, hal. 45.

Sebagai salah satu contoh, dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda atau alat. Akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Undang-undang memberikan wewenang yang luas kepada penyidik dalam mempergunakan wewenangnya dalam hal tertangkap tangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang secara patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi juga benda-benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Undang-undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan, yang berbentuk penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dengan Minuta Akta Notaris yang berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung / Pemb / 86 dan Pasal 43 KUHAP. Karena Minuta Akta ditafsirkan berkedudukan sebagai Arsip Negara atau melekat padanya “rahasia jabatan” notaris, pemberian izin oleh Ketua Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 43 KUHAP: Penyitaan harus berdasar izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.³ Namun penyitaan dalam hal ini tidak terlepas kaitannya dengan kewajiban notaris menyimpan Minuta dimaksud, sehingga wujud penyitaan yang dibenarkan terbatas pada kebolehan penyidik untuk “menyalin” atau memfotokopinya. Dalam hal ini penulis mengkaji atau menganalisis penyitaan dengan cara biasa.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan

³M. Yahya Harahap, op.cit, hal. 274.

berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang social, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Adanya dunia industri dan perdagangan tidak terlepas dari penciptaan suatu benda atau barang, hal ini dikarenakan dunia industri dan perdagangan membutuhkan benda atau barang sebagai sumber mata pencahariannya. Dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting diantaranya hal-hal yang dapat bertentangan dengan hukum seperti kejahatan pemalsuan.⁴

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003, hal. 320.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 3.

penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek lama, dengan satu Undang-Undang tentang Merek yang baru.

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.⁶

Tindak pidana yang berkaitan dengan merek, terutama merek dagang, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan merek dagang yang dapat dilihat dalam salah

⁶ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 370.

satu PERKARA : "Memperdagangkan barang berupa mesin potong rumput type FR 3000, suku cadang mesin chain saw dengan merek STIHL yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek STIHL yang sudah terdaftar dalam daftar merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Republik Indonesia tanpa izin dari ANDREAS STIHL AG. & KG dan PT. Indokita Makmur selaku agen tunggal produk merek STHIL di Indonesia sebagai pemilik merek tersebut yang dilakukan oleh tersangka LUSI ARIANI selaku pengelola toko Tagor Teknik pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 di toko Tagor Teknik Jalan Belakang Lintas No. 1 A Kecamatan Padang Barat Kota Padang".⁷

Merek merupakan tanda pembeda bagi masing-masing produk barang dan/atau jasa, sehingga terhadap barang dan atau jasa dapat dibedakan kualitas barang tanpa harus khawatir untuk memilih mana barang yang asli dan barang yang palsu atau tiruan. Merek merupakan salah satu wujud karya hak kekayaan intelektual yang sering kali dijadikan sasaran pemalsuan dan tiruan oleh para pelaku tindak pidana kejahatan khususnya dibidang merek.

Tindak pidana pemalsuan merek dagang masih belum terjadi secara luas di Kota Padang. Hal demikian bukan berarti penegakan hukum dalam pemalsuan merek dagang ini tidak efektif di Kota Padang. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan merek dagang ini bagi kegiatan perekonomian di Kota Padang ialah dapat mempengaruhi perkembangan usaha-usaha industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak, serta bagi pemantapan

⁷ Sumber Data Kantor Reskrim Polresta Padang

perkembangan ekonomi jangka panjang. Perlindungan hukum atas merek hanya terbatas pada merek terdaftar yang sifatnya eksklusif yang hanya diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar. Artinya, bahwa perlindungan atas merek terdaftar diberikan sejak diterimanya permohonan pendaftaran merek dan tercatat dalam daftar umum merek sebagai salah satu merek terdaftar.

Bagi pengusaha, dampak negatif yang timbul karena tindak pidana pemalsuan merek dagang dapat menghilangkan reputasi baik, kepercayaan dari konsumen, serta hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Dimana semua hal di atas membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Dampak negatif yang ditimbulkan bagi konsumen yaitu hilangnya kepercayaan terhadap merek dagang/produk tersebut, karena merasa tertipu telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Uraian di atas menjadi dukungan bagi penulis untuk memaparkan masalah ini ke dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ***“PENYITAAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyidik melakukan penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum POLRESTA Padang ?
2. Apakah Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum POLRESTA Padang ?
3. Apakah solusi/upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum POLRESTA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang penulis buat ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum POLRESTA Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang.

3. Untuk mengetahui solusi/upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum POLRESTA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di harapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi referensi bagi banyak pihak yang akan mendalami tentang penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca tentang bagaimana penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum POLRESTA Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tindakan penyitaan merupakan salah satu cara atau upaya dari Penyidik dalam mengumpulkan berbagai macam barang bukti, guna melengkapi hasil penyidikan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam



hal ini sebagai hasil penyidikan yang dibuatkan berita acara penyitaan yang tercantum dalam pasal apa yang disangkakan.

Penyitaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti agar ia tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana ataupun sebagai upaya memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Terdakwa sebagai orang yang mungkin akan mendapat hukuman, tentunya akan berusaha supaya hukuman yang akan dijatuhkan itu adalah yang ringan-ringannya. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa akan berbuat suatu hal yang bermaksud menyingkirkan bahan-bahan bukti yang dapat memperberat hukumannya. Misalnya saja untuk menghilangkan jejaknya, tersangka merusak, menyembunyikan, membuang atau memindahtangankan benda yang tersangkut tindak pidana tersebut, sehingga tindak pidananya tidak dapat dibuktikan lagi.

Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Dalam definisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal baru, yang tidak terdapat di dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955), yang mengatur *Wet op de Economische Delicten* di negeri Belanda.

Ketentuan ini merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHP, tercantum benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana".

Dalam hal ini tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan, yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut di atas, ialah sebagai berikut.

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHP).
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHP).
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHP).

Dalam menentukan "kebenaran" diperlukan bukti-bukti. "Bukti-bukti" dalam Kamus Bahasa Indonesia ⁸ yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara lain disebut: sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa" Bukti dalam Bahasa Inggris: *evidence*. Di dalam *The Lexicon Webster Dictionary*

⁸ Yan Pramudia puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang, Tanpa tahun, Hal 610

diartikan antara lain: *indication of something or establishes the truth*. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi Negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi Negara saja.

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan Pejabat yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

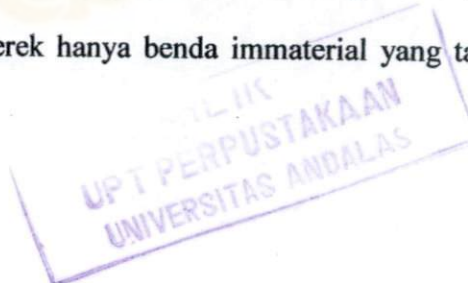
Dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga

menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu *Pertama*, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan *Kedua*, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.

Merek pada dasarnya merupakan tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda pada suatu barang. R. Soekardono (1967:149), menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin Kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distrugling*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek (Lubis, 1979:6).

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, merek bukan produk itu sendiri. karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immaterial yang tak



dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.⁹

Defenisi autentik mengenai merek dapat kita temukan di dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 sebagai berikut:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 butir 16 memberikan pengertian penyitaan sebagai berikut.
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".¹⁰

⁹ Hery firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hal 30.

¹⁰ Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- b. Pengertian bukti adalah Benda-benda yang digunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.¹¹
- c. Pengertian penyidik dapat ditemui dalam pasal 1 butir (1) KUHP yang menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- d. Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang / diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹²
- e. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.¹³
- f. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

¹¹ J.C.T Simonangkir, dkk, Kamus Hukum, (cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hal. 14

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik KUHP*, Politea, Bogor, 1997, hal 26

¹³ Dictionary, *Pengertian Pemalsuan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org>, diupdate tanggal 13 juni 2011 Pukul 13.20 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.¹⁴ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat lapangan baik yang didapat dari hasil wawancara maupun hasil observasi.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 43.

¹⁵ *Ibid* hal 38-39

3. Sumber data

Penelitian lapangan dilakukan di Polresta Padang, bahwa didalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada kantor Polresta Padang dimana data ini berkaitan langsung dengan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

b) Studi Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data pokok yang utama dan sebagai titik tolak dalam suatu hal.¹⁶ Khususnya dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung dari Penyidik Kepolisian Polresta Padang melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op cit*, hal. 896.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 10.

b. Data Sekunder

Merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dagang.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pemalsuan Merek Dagang.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang dapat baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Penyidik Polresta Padang dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Studi Dokumen

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang di peroleh dari wawancara akan diolah secara kuantitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang

dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam menarik kesimpulan di gunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁸

a) Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b) Analisis Data

Analisis data menggunakan metode komulatif, karena tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada dilapangan yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hal. 242.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Tindakan yang dilakukan untuk benda yang tersangkut dalam tindak pidana adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan maka diperlukan penyitaan.

Menurut R. Soesilo penyitaan adalah mengambil alih benda atau barang-barang dari seseorang yang memegang atau menguasai barang itu untuk kepentingan pengusutan perkara, barang-barang mana ditahan sementara dan kemudian bila tidak diperlukan lagi akan dikembalikan pada yang berhak.¹⁹

Arti dari “penyitaan” dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Unsur-unsur penyitaan dalam pasal 1 butir 16 KUHP:

- 1) Penyitaan merupakan tahap dari penyidikan
- 2) Penyitaan adalah pengambilalihan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik benda-benda milik orang lain

¹⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1979

- 3) Benda yang disita adalah benda yang bergerak dan tidak bergerak
- 4) Penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian
- 5) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik
- 6) Penyitaan bersifat sementara

Dari definisi Penyitaan dapat disimpulkan ciri penyitaan dalam hukum pidana yaitu;²⁰

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan.
- b. Penyitaan termasuk pengambilalihan atau penyimpanan dibawah penguasaan Penyidik suatu benda milik orang lain.
- c. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan atau tidak berwujud.
- d. Penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan.

Secara harafiah Penyitaan merupakan pengambil alihan dan penguasaan milik orang lain yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan atau kepentingan acara pidana.²¹

Pengertian tindakan penyitaan tersebut, secara tegas digariskan hanyalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal 265.

²¹ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hal

demikian dapat dikatakan tindakan penyitaan tidak dapat dibenarkan tanpa berdasarkan untuk kepentingan pembuktian dan batal demi hukum.

Penyitaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti agar ia tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana ataupun sebagai upaya memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Terdakwa sebagai orang yang mungkin akan mendapat hukuman, tentunya akan berusaha supaya hukuman yang akan dijatuhkan itu adalah yang ringan-ringannya. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa akan berbuat suatu hal yang bermaksud menyingkirkan bahan-bahan bukti yang dapat memperberat hukumannya. Misalnya saja untuk menghilangkan jejaknya, tersangka merusak, menyembunyikan, membuang atau memindahtangankan benda yang tersangkut tindak pidana tersebut, sehingga tindak pidananya tidak dapat dibuktikan lagi.

Dalam Pasal 134 Ned. Sv. Memberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut : “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambil alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana”. Jadi, tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.²² Selanjutnya *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut. “*Everyone has the right to own property alone as in association with other, No one shall be arbitrarily deprived of his property*”. Yang artinya hemat penulis adalah

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 144.

Setiap orang berhak mempunyai milik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Persamaan kedua definisi tersebut ialah pengambilan dan penguasaan milik orang lain. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang.

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) atau Laporan Hasil Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Tersangka, dimana penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda yang dapat disita guna kepentingan penyidikan.

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak azasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan agar tidak terjadi penyitaan diluar batas-batas ketentuan undang-undang yang ada, atau tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini penyitaan diatur dalam Pasal 38 KUHP:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

2. Macam-Macam Benda Yang Dapat disita

Dalam definisi KUHP mengenai penyitaan terdapat hal baru, yang tidak terdapat di dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-

undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955), yang mengatur *Wet op de Economische Delicten* di negeri Belanda.

Ketentuan ini merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP, tercantum benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana". Dalam hal ini tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan, yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda yang dapat disita selain yang tersebut di atas, ialah sebagai berikut.

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHAP).
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP).
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP).

3. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Dari setiap proses penyidikan suatu tindak pidana, salah satu tahapan yang dilalui adalah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada kaitan dengan tindak

pidana yang terjadi.. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. “ bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Penyidik Yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari rumusan Pasal 1 butir 16 KUHAP dapat diketahui bahwa penyitaan tersebut *dilakukan oleh penyidik*, yakni:

- a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Komandan Sektor (Dansek);
- d. Penyidik Pembantu;
- e. Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu. (Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 17 dari PP No. 27/1983). “*Dilakukan oleh penyidik*” digaris bawah tetapi tidak berarti hanya pada tahap penyidikan, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan bahkan pada pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan berdasarkan “penetapan” Pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila dilihat dan diperhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum pidana (undang-undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara tersirat akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.²³

Menurut HIR, pengertian barang Bukti ini hanya berupa barang-barang bergerak saja (Pasal 42 jo 63 HIR), sedangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi mengenal barang bukti berupa: Barang tak tetap yang berwujud dan tak berwujud (Pasal 7). Kemudian Menurut KUHP barang Bukti tersebut dikenal berupa: benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 1 butir 6). Jadi Pengertian barang bukti adalah barang-barang baik berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada

²³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal 1

terdakwa di depan persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.²⁴

Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah adalah:

“Barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik”.

2. Bentuk-bentuk Barang Bukti

Seperti kita ketahui bahwa barang bukti itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, yang mana untuk memperolehnya dilakukan penyitaan terlebih dahulu.

Menurut Wirjono Projodikoro, barang-barang yang dapat disita adalah:²⁵

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpus delicti*)
- 2) Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- 3) Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

²⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 147

²⁵ Ibid.

- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti kearah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

Sedangkan dalam HIR (Pasal 42) barang-barang yang dapat disita adalah:

- 1) Barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan
- 2) Barang-barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu.

Di dalam Pasal 39 KUHAP dinyatakan, bahwa benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang

²⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 150

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian penyidik dalam melakukan penyidikan dengan maksud untuk menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana terjadi.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP alat-alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hal tersebut dapat diartikan bahwa di luar 5 (lima) macam alat bukti yang sah tersebut tidak ada lagi alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut dalam praktek hukum bukan saja dapat membingungkan, tetapi kadang-kadang dapat menimbulkan kekaburan pengertian dan permasalahan.

Bahwa benda sitaan sebagai barang bukti secara yuridis formal tidak tersurat atau tidak termasuk dalam alat bukti yang sah, namun dalam proses praktek atau praktek peradilan barang bukti itu secara materil dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHP mempertegas fungsi dari benda sitaan adalah untuk upaya pembuktian, didalam praktek benda sitaan juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim dalam menghadapi dan memutus suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Karena dengan adanya barang bukti dapat mewujudkan kebenaran.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Polri

1. Pengertian Penyidik Polri

Pengertian penyidik dapat kita lihat pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁷

Menurut Pasal 6 KUHP penyidik di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mengenai penyidik polisi sudah tentu dilakukan oleh institusi kepolisian yang bertugas menangani permasalahan kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat imigrasi, bea dan

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

cukai serta tergantung dimana pejabat itu diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.

Mengenai syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik ditentukan dalam peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.²⁸

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP, yaitu Pejabat Kepolisian yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur undang-undang.

²⁸ Andi Hamzah, Op, Cit. hal, 77

Mengenai syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan:

- a. Penyidik Pembantu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Polisi Dua.
- b. Penyidik Pembantu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.
- c. Wewenang pengangkatan penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri

Mengenai tugas dan kewenangan penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang mana kewenangannya antara lain:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16 ayat (1) memuat kewenangan penyidik yaitu:

- a. Melarang setiap orang meninggalkan/ memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan.
- b. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik untuk penyidikan.
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

- e. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- f. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan ada beberapa tugas yang dilakukan oleh penyidik antara lain:

a) Melakukan penangkapan

Penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yang bertujuan untuk penyidikan, penuntutan dan persidangan. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 16 KUHP yang isinya:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

b) Melakukan penahanan

Penahanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 KUHP yaitu:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

c) Melakukan penggeledahan

Penyidik dapat melakukan penggeledahan sesuai Pasal 32 KUHAP yang menegaskan bahwa, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang KUHAP.

d) Melakukan penyitaan

Penyidik dapat melakukan penyitaan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 38-46 KUHAP pada dasarnya dalam pasal ini menyatakan bahwa yang berhak melakukan penyitaan adalah kepolisian sebagai penyidik yang bertujuan untuk mengambil atau mengumpulkan barang-barang atau benda-benda untuk pembuktian baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan.

e) Melakukan pemeriksaan surat

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim dan menyita surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos dan telekomunikasi, jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Tindakan tersebut harus ada izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP, Penyidik yang melakukan pemeriksaan surat wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Surat. Turunan berita Acara tersebut dikirim kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi. Kepala jawatan pengangkutan yang bersangkutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang

1. Pengertian Merek

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu *Pertama*, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan *Kedua*, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.

Merek pada dasarnya merupakan tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda pada suatu barang. R. Soekardono,²⁹ menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau

²⁹ Hery firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 29.

badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Menurut Lubis,³⁰ kalau tidak ada perbedaan, maka tidak mungkin disebut merek.

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, merek bukan produk itu sendiri. karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.³¹

Defenisi autentik mengenai merek dapat kita temukan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 sebagai berikut:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang defenisi merek sebagai berikut:

"Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible."

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs yaitu penekanan mengenai "unsur pembeda". Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan "daya pembeda") adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal ini penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 khususnya poin b yang menyatakan bahwa:

Merek tidak dapat di daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 ayat (1) a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ketentuan ayat (3) menentukan bahwa khususnya dilarang terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apa pun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing. Juga semua tindakan-tindakan

dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang.

Prinsip "iktikad baik" ini harus diterapkan dalam hal kepemilikan suatu merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

2. Fungsi Merek

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:

a. Menjaga persaingan usaha yang sehat

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar-kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

b. Melindungi konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 2001 di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya undang-undang ini adalah untuk

melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya;

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya.

Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan;

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang.

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya;

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja;

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang

Merek merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual manusia disamping hak atas kekayaan intelektual lainnya dan sekaligus kekayaan Negara, oleh karena itu keberadaan merek tersebut ditengah-tengah masyarakat perlu diatur dan diterbitkan dalam suatu peraturan yang mengikat semua pihak demi terpeliharanya dan terjaminnya pemakaian atas penggunaan merek tersebut dari peniruan, pemalsuan oleh orang atau badan yang tidak berhak.

Banyak terjadi dalam masyarakat pemakaian merek tertentu yang merugikan si pemilik merek dan sekaligus mengecoh masyarakat dengan cara membonceng ketenaran suatu merek tertentu yang telah terkenal untuk barang yang bermutu baik atau jasa yang memuaskan, dengan cara memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis atau memakai merek tanpa hak.

Salah satu bentuk pelanggaran atas merek adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar

seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³² Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan memproduksi tidak diaanggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan.

Pelaku pemalsuan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Pemalsuan merek dapat dikatakan kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha lainnya. Upaya memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain adalah jenis pelanggaran merek yang termasuk bagian dari persaingan curang.

Pemalsuan merek merupakan salah satu masalah yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar dalam masalah ini. Karena dari ratusan merek yang beredar tersebut adalah merek yang sah atau legal, dalam artian dimiliki oleh orang yang berhak serta terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 3.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, definisi tindak pidana pemalsuan merek dagang diatur khusus. Sedangkan, mengenai tindak pidana pemalsuan merek dagang sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 90 dan 91.

Pasal 90

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 91

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang secara yuridis formal dapat bertanggung jawab secara hukum mengenai segala perilaku yang telah diperbuat.³³

³³ Hery firmansyah, op.cit., hal. 60.

b. Dengan sengaja.

Kesengajaan merupakan niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum dan dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan.³⁴

c. Tanpa hak

Tanpa hak artinya menggunakan tidak sesuai dengan hak-nya atau mengetahui bahwa ia menggunakan secara tanpa hak.³⁵

d. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya (Pasal 90) dan atau sama pada pokoknya (Pasal 91) dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain.

Adapun yang dimaksud dengan sama pada keseluruhannya adalah membuat produk tiruan yang persis sama dengan produk yang asli, baik etiket mereknya, kemasan maupun ciri-ciri lainnya. Sedangkan sama pada pokoknya adalah merek tersebut serupa, mirip tetapi jika diamati dengan cermat masih ada "daya pembeda" walaupun sepiantas. Selain itu yang menentukan persamaan adalah kesan dari merek yang bersangkutan kepada khalayak ramai.³⁶

e. Untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Unsur ini bermakna:

1) Diproduksi dan diperdagangkan.

³⁴ Hery firmansyah, *loc. cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

2) Diproduksi atau diperdagangkan.

Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi salah satu unsur-unsur dari Pasal 90 dan Pasal 91 maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan persaingan tidak sehat dalam bidang merek. Pelaku dari persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Pengaturan tentang sanksi pidana pelanggaran merek dapat pula ditemukan di dalam Pasal 92, 93, 94, dan 95 UU No. 15 Tahun 2001

Menurut Pasal 382 *bis* KUH Pidana, perbuatan persaingan tidak sehat dapat dihukum apabila:

1. Terdakwa melakukan perbuatan menipu.
2. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik/seseorang yang tertentu.
3. Perbuatan dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan/perusahaan sendiri/orang lain.
4. Karena perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya. Saingan itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.³⁷

Berdasarkan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu persaingan tidak sehat terkandung unsur penipuan. Istilah menipu berarti memperdaya orang lain atau khalayak ramai agar mereka di dalam memilih suatu hasil produksi bisa tersesat.

³⁷ *Ibid.*

Mengenai memperdayai publik di bidang merek menurut Prakoso,³⁸ sebagai contohnya adalah:

- a. Membuat merek yang hampir sama.
- b. Membuat merek yang sama (meniru secara keseluruhan).
- c. Membuat etiket/bungkus yang hampir sama.

Dengan adanya Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, maka tindak pidana biasa yang diatur pada undang-undang sebelumnya beralih pada tindak pidana aduan (Pasal 95). Ini artinya, hanya dengan berdasarkan laporan dari pemilik merek bersangkutan, maka akan dituntut dan dikenakan sanksi atau diadakan penyidikan oleh PPNS atau kepolisian.

³⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Penyidik Melakukan Penyitaan Barang Bukti Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh penyidik dapat dilihat dalam contoh kasus seperti berikut ini: Memperdagangkan barang berupa mesin potong rumput type FR 3000, Suku Cadang Mesin Chain Saw dengan merek STIHL yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Merek STIHL yang sudah terdaftar dalam daftar Merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia tanpa izin dari ANDREAS STIHL AG. &. KG dan PT. Indokita Makmur selaku Agen tunggal produk merek STIHL di Indonesia Sebagai Pemilik merek tersebut yang dilakukan oleh tersangka LUSI ARIANI selaku pengelola toko Tagor Teknik pada hari senin tanggal 24 Januari 2011 di toko TAGOR TEKNIK Jalan Belakang Lintas No. 1 A Kec. Padang Barat Kota Padang.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di Polresta Padang mengenai kasus tentang penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang melalui wawancara dengan Bapak Aiptu Sadri Hefiman beliau menjelaskan

bahwa:³⁹ Pada hari Senin tanggal 24 Januari dua ribu sebelas (2011) sekira Pukul 14.30WIB, Saya SYAFRIZEN Pangkat IPTU Nrp. 72010064, jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas bersama dengan Nama, Pangkat, Nrp : SADRI HEFIMAN / AIPTU / NRP 58030626. Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan:

1. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 136 / K / I / 2011 – Resta, tanggal 24 Januari 2011.
2. Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor :
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / / I / 2011 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2011. Telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit Komplek mesin potong rumput merek STIHL type FR 3000 yang diduga Palsu.
1 (satu) lembar Nota Pembelian mesin potong rumput type FR 3000 yang tertanggal 25 – 01 – 2011 yang bercap stempel Tagor Teknik.

Dalam Perkara Tindak Pidana Memperdagangkan barang-barang berupa mesin potong rumput dengan Merek STIHL yang diduga palsu yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira jam 11.00 WIB di toko Tagor Teknik Jalan Belakang Lintas No. 1 A Kota Padang, sebagaimana diatur dalam pasal 94 UU. No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

³⁹ Hasil wawancara langsung dengan Aiptu Sadri Hefiman. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.00 Wib

Adapun jalan Penyitaan Barang Bukti sebagai berikut: Barang bukti tersebut di atas disita dari saksi pembeli yaitu SUDRI oleh Polisi di Polresta Padang dengan disaksikan oleh HENDRIK SANTOSO sebagai karyawan PT. Indokita Makmur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu Peldi Nofrizal beliau menjelaskan bahwa:⁴⁰ Dalam kasus ini penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polresta Padang adalah penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri yang mana atas alasan patut dkhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Berdasarkan penjelasan diatas hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 KUHP.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, pembuat undang-undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam konkreto. Berdasar perkiraan kemungkinan itu mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk tata cara penyitaan, agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

1. Penyitaan Biasa dan Tata Caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau

⁴⁰ Hasil wawancara langsung dengan Briptu Peldi Nofrizal. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.30 Wib

keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut.⁴¹

a. Harus ada Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Salah satu tujuan pokok izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Bertitik tolak dari latar belakang pemberian izin sebagai pengawasan dan pengendalian, Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan yang diajukan penyidik. Cuma penolakan izin yang dilakukan memuat alasan berdasar hukum dan undang-undang. Jangan asal menolak tanpa argumentasi atau pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik, menunjukkan “tanda pengenal” jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

⁴¹ Hasil wawancara langsung dengan Aiptu Sadri Hefiman. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.00 Wib.

c. Memperlihatkan Benda yang Akan Disita (Pasal 129)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang yang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda yang disita. Dan pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita.

d. Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi

Syarat atau tata cara selanjutnya, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ketempat pelaksanaan sita, sekurang-kurangnya tiga orang. Saksi pertama dan utama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (Ketua RT / RW), ditambah dua orang saksi lainnya (Pasal 129 ayat (1)).

e. Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2), yang menjelaskan:

1. Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi,

- d) Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara,
- e) Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan "tanda tangan" pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).

Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebut alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.

f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan

Kalau diperhatikan kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali. Pengawasan dan pengendalian itu dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat meliputi kalangan-kalangan lingkungan yang agak luas. Baik pengawasan dan pengendalian diri atasan langsung penyidik sebagai *built in control*, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri:

1. Sebagai pengawas dan pengendalian dari segi structural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada "atasan" (Pasal 129 ayat (4)),

2. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada:

- b. orang dari mana barang itu disita atau keluarganya, dan
- c. kepala desa.
- d.

g. Membungkus Benda Sitaan

Patut dan wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang sendiri. Sebab alangkah tragis, apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka. Ternyata pada waktu benda yang disita itu dikembalikan kepadanya, sudah hancur dan tidak mempunyai nilai apa-apa lagi.

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan:

1. Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya,
2. Dicatat hari tanggal penyitaan,
3. Tempat dilakukan penyitaan,
4. Identitas orang dari mana benda itu disita,

5. Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) di atas, ayat (2) pasal tersebut menentukan:

- 1) Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 di atas,
- 2) Catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

2. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Setelah disesuaikan dengan maksud penyitaan, dapat disimpulkan sebagai berikut: “keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka”. Itulah kira-kira pengertian dalam keadaan mendesak yang dirumuskan sendiri oleh pembuat undang-undang. Rumusan penjelasan ini agak mengambang, dan penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang digambarkan, lebih dititikberatkan pada penilaian subjektif pejabat penyidik. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:⁴²

a. Tanpa “Surat Izin” Ketua Pengadilan Negeri

⁴² Hasil wawancara langsung dengan Aiptu Sadri Hefiman. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.00 Wib.

- b. Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja
- c. Wajib segera “Melaporkan” Guna Mendapatkan “Persetujuan”

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:⁴³

- 1) yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- 2) benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- 3) benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Di samping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40, Pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:

- 1) menyita paket atau surat,
- 2) atau benda pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan,

⁴³ Hasil wawancara langsung dengan Briptu Peldi Nofrizal. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.30 Wib

- 3) asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka,
- 4) namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat "surat tanda terima" kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Pada ketentuan Pasal 41, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan "langsung" oleh penyidik.

4. Penyitaan Tidak Langsung

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan dikenal bentuk dan cara penyitaan "langsung" oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, Pasal 42 memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan "tidak langsung". Benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas, kita menyebut bentuk dan cara ini "penyitaan tidak langsung". Artinya tangan dan upaya paksa penyidik dalam

melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi disuruh antar atau disuruh serahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

5. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain

Di atas sudah dibicarakan penyitaan surat dan benda pos atau benda telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan, yang memberi wewenang kepada penyidik "langsung" menyita surat atau benda pos dimaksud. Demikian juga halnya pada penyitaan surat secara tidak langsung melalui perintah penyidik kepada pemegang atau yang menguasai untuk menyerahkan kepada penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2). Maka pada Pasal 43, diatur pula bentuk dan cara penyitaan surat-surat lain di luar surat-surat yang disebut pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2).

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 adalah surat atau tulisan yang "disimpan" atau "dikuasai" oleh orang tertentu, di mana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, "diwajibkan merahasiakannya" oleh undang-undang. Misalnya, seorang notaris adalah pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akta testamen, dan oleh undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan isinya. Akan tetapi perlu diingat, kepada kelompok surat atau tulisan lain ini tidak termasuk surat atau tulisan yang menyangkut "rahasia negara". Surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara "tidak takluk" kepada ketentuan Pasal 43 KUHP. Oleh karena itu, Pasal 43 tidak dapat

diperlakukan sepanjang tulisan atau surat yang menyangkut rahasia negara. Atau kalau dibalik, Pasal 43 hanya dapat diterapkan terhadap surat dan tulisan yang “tidak” menyangkut rahasia negara. Mengenai syarat dan acara penyitaannya:

- i. Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan,
- ii. Atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu “setuju atas penyitaan” yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan “tanpa surat izin” Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan “tidak setuju” atas penyitaan yang akan dilakukan penyidik, dalam hal seperti itu penyitaan hanya dapat dilakukan “atas izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri setempat.

6. Penyitaan Minuta Akta Notaris Berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung /
Pemb / 3429 / 86 dan Pasal 43 KUHAP

Mengenai masalah ini dapat dikemukakan pedoman berikut.

- a. Ketua Pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan “relevansi” dan “urgensi” penyitaan secara objektif berdasar Pasal 39 KUHAP.

- b. Pemberian izin khusus Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan Minuta Akta Notaris, berpedoman kepada petunjuk teknis dan operasional yang digariskan dalam Surat MA No. MA / Pemb / 3429 / 86 (12 April 1986), antara lain menjelaskan:
- i. Pada prinsipnya minuta akta menurut pasal 40 PJN hanya boleh diperlihatkan atau diberitahu kepada orang yang berkepentingan langsung. Sehubungan dengan itu, notaris berada dalam posisi sulit menghadapi proses pidana yang dihadapkan kepadanya,
 - ii. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 KUHP, lebih tinggi tingkatannya dari PJN, oleh karena itu, apa yang diatur dalam Pasal 40 PJN selayaknya tunduk kepada penyitaan yang diatur dalam KUHP,
 - iii. Selanjutnya, Minuta Akta yang disimpan oleh notaris, pada umumnya dianggap sebagai arsip negara.
- c. Oleh karena Minuta Akta ditafsirkan berkedudukan sebagai Arsip Negara atau melekat padanya “rahasia jabatan” notaris, pemberian izin oleh Ketua Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 43 KUHP: penyitaan harus berdasarkan Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri.
- Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan petunjuk sebagai pedoman:
- i. Tidak tepat pendapat yang menyatakan Minuta Akta tidak bisa disita,
 - ii. Berdasar Pasal 43 KUHP dikaitkan dengan Surat Mahkamah Agung No. MA / Pemb / 3429 / 86 / (12 April 1986):

- 1) Penyidik dapat meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyita Minuta Akta,
- 2) Untuk itu, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Izin Khusus yang dituangkan dalam penetapan.

Namun penyitaan dalam hal ini tidak terlepas kaitannya dengan kewajiban notaris menyimpan Minuta dimaksud, sehingga wujud penyitaan yang dibenarkan terbatas pada kebolehan penyidik untuk “menyalin” atau memfotokopinya.

B. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyitaan tindak pidana pemalsuan merek dagang.

Menjadi negara yang besar bukanlah suatu hal yang mudah untuk diraih secepat mungkin oleh suatu negara, tentunya harus belajar dan mempelajari apa-apa yang menjadi hal-hal positif serta potensi yang ada dalam suatu negara itu. Salah satu faktor untuk perkembangan atau kemajuan negara itu adalah terletak pada perkembangan perekonomian negara itu sendiri. Dalam pelaksanaan ketentraman bangsa itu tentunya ada pengaturan-pengaturan yang memberikan keteraturan sehingga terciptanya keseimbangan keamanan dan ketentraman.

Pemimpin haruslah bijaksana karena bijaksana adalah tiang yang kokoh bagi pertumbuhan pribadi. Timbulnya kebijaksanaan adalah karena ilmu, ketetapan hati, dan karena meletakkan sesuatu pada tempatnya, serta memiliki sesuatu menurut harganya. Orang yang bijaksana tepat pendapatnya, jauh pandangannya dan baik tafsirnya. Dia dapat membedakan mana yang benar dan mana pula yang salah, mana

yang patut dikerjakan dan mana pula yang tidak patut untuk dikerjakan. Ia kenal akan tempat dan tahun akan waktu. Mengetahui lobang yang akan dimasukinya, dan tau jalan yang akan dilaluinya. Kalau dia menegakan suatu hukum, maka tidaklah pengaruh apapun juga termasuk hawa nafsu.

Seperti yang telah disampaikan pada bagian awal dari tulisan ini bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, disamping itu merek juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan, sehingga banyak pengusaha yang menyiapkan jutaan dolar untuk biaya promosi guna memperkenalkan produk dengan menggunakan merek yang dimilikinya.

Namun sayang tidak semua pengusaha mampu dan mau melakukan hal seperti itu, banyak diantara mereka yang justru memanfaatkan ketenaran suatu merek untuk keuntungan pribadinya tanpa memperdulikan hak-hak dari pemilik merek dan hak-hak konsumen sebagai pengguna merek tersebut. Walaupun secara umum kegiatan itu tidak memberikan dampak yang meresahkan masyarakat luas, namun secara ekonomi tindakan seperti itu jelas sangat merugikan, karena yang rugi bukan hanya pemegang hak merek dan konsumen saja, tetapi juga merugikan negara dengan hilangnya potensi penerimaan pajak dari penjualan dan pemasaran produk yang mereknya dibajak, disamping itu hal tersebut juga dapat merusak citra Indonesia di mata dunia internasional.

Modus operandi yang dilakukan oleh para pembajak merek baik yang menyangkut merek luar negeri ataupun merek dari dalam negeri pada umumnya

dilakukan dengan cara:⁴⁴ Menyeludup, memalsu dokumen, memproduksi/ menggandakan/ membajak, memalsu/ meniru dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan operasi dilapangan para pembajak tersebut melakukan dengan berbagai cara, antara lain memanfaatkan kurir dalam pendistribusiannya serta para pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang di mall serta pertokoan-pertokoan lainnya. Secara lebih jelas akan penulis uraikan lebih lanjut mengenai modus operandi dari para pembajak merek tersebut yang dibagi dalam berbagai kategori seperti produsen resmi, produsen tidak resmi, distributor, pedagang dan oknum petugas. Berikut penjelasannya:

1. Produsen atau pengusaha resmi

Produsen dan pengusaha resmi biasanya memproduksi sendiri suatu barang yang bentuk atau kemasannya dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai atau sama dengan merek lain dengan tujuan untuk mengecoh konsumen dan kemudian melempar ke pasaran secara besar-besaran melalui agen atau distributor yang dimilikinya. Selain itu terkadang mereka juga dengan sengaja mengimpor barang-barang (biasanya dari China, Taiwan, atau India) yang bentuknya mirip dengan barang-barang dari merek terkenal kemudian mereka memberi label/merek pada barang-barang tersebut dengan merek yang ingin dibajaknya. Sehingga sepintas lalu barang tersebut seperti barang asli dari merek terkenal.

⁴⁴ Hasil wawancara langsung dengan Aiptu Sadri Hefiman. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.00 Wib

2. Pengusaha Tidak Resmi

Produsen tidak resmi pada umumnya adalah pengusaha kecil yang melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi pada lokasi yang sulit diketahui seperti diperumahan (*home industry*). Mereka biasanya memproduksi barang dalam jumlah terbatas dan hanya dipasarkan secara terbatas pula. Agar barang yang mereka jual cepat dapat diserap oleh pasar maka mereka sengaja menempelkan label yang mirip atau menyerupai merek yang telah diketahui secara umum. Beberapa diantara mereka ada yang sudah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan seperti itu merupakan tindak pidana, namun tidak sedikit yang tidak mengetahui atau hanya sekedar ikut-ikutan saja.

3. Distributor

Para distributor dalam usaha mendistribusikan barang-barang dari hasil penggunaan merek secara tanpa hak biasanya mempergunakan pola "*cut out system*" atau sistim distribusi putus, artinya para distributor memanfaatkan jasa "kurir" untuk menyalurkan barang-barang tersebut kepada para pengecer, sehingga mereka tidak mengetahui siapa yang menjadi sumber pemasoknya.

4. Pengecer/pedagang

Dilakukan oleh para pemilik toko, kios, serta pedagang kaki lima yang dalam satu lokasi bisa terdiri dari banyak orang sehingga mereka dapat membentuk kekuatan masa untuk melawan jika terjadi penindakan oleh polisi.

Dalam proses pelaksanaan penyitaan terhadap pemalsuan merek dagang pihak terkait dalam hal ini polisi mempunyai hambatan yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis yaitu:⁴⁵

1. Barang yang akan disita telah terjual sebagian, sehingga penyidik tidak dapat menyita barang palsu tersebut secara keseluruhan, dikarenakan identitas pembeli barang tersebut tidak diketahui.
2. Keterbatasan personil penyidik yang turun ke lapangan yang mempunyai keahlian dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang, biasanya penyidik tipiter (tindak pidana tertentu) terbatas personilnya, sarana dan prasarana guna melakukan prosedur penyitaan tersebut.
3. Pedagang yang mempunyai barang atau merek palsu tersebut berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dimilikinya itu palsu.⁴⁶
4. Selain itu penyidik juga susah melakukan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang ini karena dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang ini yang berlaku adalah delik aduan.
5. Serta kurangnya kepatuhan produsen terhadap penegakkan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek dagang.

⁴⁵ Hasil wawancara langsung dengan Aiptu Sadri Hefiman. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.00 Wib

⁴⁶ Hasil wawancara langsung dengan Briptu Peldi Nofrizal. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 30 Desember 2011 jam 10.00 Wib

C. Solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang.

Selanjutnya dalam mengatasi kendala serta untuk menciptakan kepatuhan hukum tentunya harus lebih membuka diri untuk saling membutuhkan satu sama lainnya yang nantinya dapat mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum HAKI ini. Hukum akan dapat di tegakkan bila semua pihak berperan aktif untuk bersama-sama menanggulangi setiap bentuk kejahatan ini sehingga penanganannya benar-benar terlaksana sesuai dengan apa yang di harapkan oleh semua pihak dan undang-undang yang memerintahkannya.

Menanggulangi suatu perbuatan kejahatan pidana tentunya akan memberikan arti yang sangat penting bagi aparat penegak hukum, sebab disamping harus mencari keadilan mereka juga harus menjaga kenetralitasnya agar nantinya tidak memberikan ketimpangan hukum yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada proses hukum pada di negeri ini.

Solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pemalsuan merek dagang adalah:⁴⁷

Upaya Preventif :

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi faktor kesempatan/peluang bagi para pelaku, seperti:⁴⁸

⁴⁷Hasil wawancara langsung dengan Aiptu Sadri Hefiman. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 20 September 2011 jam 10.00 Wib

1. Penambahan Personil Penyidik yang turun ke lapangan yang mempunyai keahlian dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang, biasanya penyidik tipiter (Tindak Pidana Tertentu) oleh KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal).
2. Mengadakan sosialisasi untuk memberikan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang.
3. Melakukan kerjasama dengan para pengelola media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum, upaya ini adalah upaya terakhir. Keberhasilan upaya penindakan hukum ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari para anggota penegak hukum dalam memeriksa kasus, seperti :

1. Pihak Penyidik Kepolisian Menjelaskan kepada penjual yang mempunyai barang alasan-alasan hukum sebab dilakukan penyitaan terhadap barang palsu, serta memperlihatkan sampel barang asli kepada penjual tersebut.
2. Pihak Kepolisian dapat menyita barang yang masih dikuasai / dimiliki oleh penjual tersebut.

⁴⁸ Hasil wawancara langsung dengan Briptu Peldi Nofrizal. Penyidik dibagian Tindak Pidana Tertentu Polresta Padang 30 Desember 2011 jam 10.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyitaan pemalsuan merek dagang oleh petugas Kepolisian setelah mendapatkan laporan dari korban / saksi yang mengetahui bahwa diduga merek dagangnya telah dipalsukan oleh pihak lain. Untuk itu penyidik dapat melakukan penyidikan ditempat dimana tindak pidana tersebut terjadi. Dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam melaksanakan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang, yaitu:
 1. Barang yang akan disita telah terjual sebagian.
 3. Keterbatasan personil penyidik yang turun ke lapangan yang mempunyai keahlian.
 4. Pedagang yang mempunyai barang atau merek palsu tersebut berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dimilikinya itu palsu.

5. Selain itu penyidik juga susah melakukan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang ini karena dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang ini yang berlaku adalah delik aduan.
 6. Serta kurangnya kepatuhan produsen terhadap penegakkan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek dagang.
3. Solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penyitaan barang bukti dalam tindak pemalsuan merek dagang adalah:
1. Penambahan Personil Penyidik yang turun ke lapangan.
 2. Mengadakan sosialisasi untuk memberikan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang.
 3. Melakukan kerjasama dengan para pengelola media.
 4. Pihak Penyidik Kepolisian Menjelaskan kepada penjual yang mempunyai barang alasan-alasan hukum sebab dilakukan penyitaan terhadap barang palsu, serta memperlihatkan sampel barang asli kepada penjual tersebut.
 5. Pihak Kepolisian dapat menyita barang yang masih dikuasai / dimiliki oleh penjual.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini dan berdasarkan kenyataan yang ditemui penulis, maka ada beberapa hal yang sangat penting ingin penulis kemukakan sebagai saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun saran yang penulis maksud antara lain:

1. Diharapkan penambahan personil penyidik yang turun ke lapangan yang mempunyai keahlian dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang, biasanya penyidik tipiter (tindak pidana tertentu) terbatas personilnya, sarana dan prasarana guna melakukan prosedur penyitaan tersebut
2. Pihak kepolisian diharapkan lebih gencar melakukan penyuluhan terhadap merek palsu, agar masyarakat / pedagang sadar akan kerugian yang ditimbulkan terhadap merek palsu tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alfiah Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Firmansyah Hery. 2011 *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2005 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001. *Analisis Evaluasi Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI.
- Harahap Yahya, 2002 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Moelyatno, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miru Ahmadi, 2007 *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo R., 1979 *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.

Usman Rachmadi, 2003 *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung.

Prakoso Djoko, 1998 *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jakarta.

Prokoso Djoko, 1987 *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Bima Aksara.

Prodjodikoro Wirjono, 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Van Apeldoorn, 1971 *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke II, Pradya Paramita, Jakarta.

KAMUS:

Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.

Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1976

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982

Peraturan Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983*, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1983.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

KUHP KHUSUS (Kompilasi Ketentuan Dalam Undang-Undang Pidana Khusus),
Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung / Pemb / 3429 / 86.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik indonesia*, CV. Tamita Utama, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Sinar Grafika, Jakarta,
2006.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG
Jalan Prof. M.Yamin, SH. No. 1 Padang 25111

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini Senin tanggal 24 Januari dua ribu sebelas 92011 sekira Pukul 14.30WIB, Saya -----
----- : SYAFRIZEN : -----
Pangkat IPTU Nrp. 72010064, jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas bersama dengan : -----
Nama, Pangkat, Nrp : SADRI HEFIMAN / APTU / NRP 58030626. -----
Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----
1. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 136 / K / I / 2011 – Resta, tanggal 24 Januari 2011. -----
2. Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor : -----
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / / I / 2011 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2011. -----
Telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa : -----
- 1 (Satu) Unit Komplek mesin potong rumput merek STIHL type FR 3000 yang diduga Palsu.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian mesin potong rumput type FR 3000 yang tertanggal 25 – 01 – 2011
yang bercap stempel Tagor Teknik. -----

Dari : -----
Nama : SUDRI
Tempat / Tgl. Lahir / Umur : Kendal / 06 September 1969 / 42 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Indokita Makmur
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 150 – ABC Jakarta Barat

Dengan disaksikan oleh : -----
1. Nama : HENDRIK SANTOSO
Pekerjaan : Karyawan PT. Indokita Makmur
Alamat : Poltabes Padang.

Dalam Perkara Tindak Pidana Memperdagangkan barang-barang berupa mesin potong rumput dengan Merek STIHL yang diduga palsu yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira jam 11.00 WIB di toko Tagor Teknik Jalan Belakang Lintas No. 1 A Kota Padang, sebagaimana diatur dalam pasal 94 UU. No. 15 tahun 2001 tentang Merek. -----

Adapun jalan Penyitaan Barang Bukti sebagai berikut : Barang bukti tersebut di atas disita dari saksi pembeli yaitu SUDRI oleh Polisi di Polresta Padang. -----

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pemilik barang / yang menguasai

Penyidik Pembantu

ttd

ttd

SUDRI

SYAFRIZEN

INSPEKTUR SATU POLISI NRP 72010064

Saksi-saksi

1. HENDRIK SANTOSO